

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas Menuju Indonesia Berkinerja (2019) (<http://lib.lemhannas.go.id/>)
- Deddi, N., & Ayuningtyas, H. 2010. Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat
- Dwiyanto, Agus. 2008. Good governance melalui pelayanan publik. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press
- Elsje Celvia Mongisidi, Rosalina A.M Koleangan Debby Ch. Rotinsulu, .2021. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado Vol 20 No 1
- Elsa Fitri Amran, Basrefnaldi, Silfira. 2021. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman AkSya : Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 1, No 1
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), 80–85.
- Haryono. 2020. Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Landak. Jurnal Jaakfe, 10(2), 36–48
- Instruksi Presiden No. 10. 2016. Tentang Aksi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi).
- Instruksi Bupati Madiun Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash)
- Kautsar, A. Al. 2021. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 115–124.
- Kristina Yumanthia, 2020. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai *Good governance* Di Kota Palangkaraya
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29. 2002. Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- Kurnia, lidanna dian. 2020. Analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota metro provinsi lampung. Jurnal Manajemen, 14(1).

- Kelebihan dan kekurangan pembayaran nontunai (2019).
(<http://www.etcbeabakery.com/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pembayaran-non-tunai/>)
- LAN, TIM. 2004. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua)*.
Jakarta:Lembaga Administrasi Negara
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*.
Jakarta.
- Mahsun, M., Purwanugraha, H. A., & Sulistiyowati, F. 2015. *Akuntansi sektor publik*.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi,2009
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* Jakarta:
Salemba Empat.
- Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi
Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1171–1181.
- Peraturan pemerintah RI No. 12. 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Bupati Nomor 66A tahun 2016 tentang *Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan
Daerah*
- Rotinsulu, E. C. M. R. A. . K. D. C. 2019. Analisis implementasi transaksi non tunai
dalam pengelolaan keuangan di dinas pendapatan daerah kota manado. *Jurnal
Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 15–30.
- Rosmiati, W. &. 2020. Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus
pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat).
Jurnal Akuntansi, 26–27.
- Selly Septiani, Endah Kusumastuti, 2019. Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam
Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip *Good
governance* (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Jurusan Akuntansi, Politeknik
Negeri Bandung, Bandung

Surat Edaran Menteri dalam Negeri No 910/1867/SJ. 2016. Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Siagian, S. P. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi, jakarta: PT. Aksara Bumi

Suluh Hendrawan, Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah, 2019. Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2),

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tim Peneliti FH UNDIP. 2015. *Persyaratan dan implikasi pengaturan pmbatasan transaksi tunai di Indonesia*. Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 12, hal 31- 50

Undang Undang RI No.32. 2004. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: CV Cutra Media.

